



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Tahun 2019**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmad dan karuniaNYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Menteri PANRB tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta alat kendali bagi peningkatan kinerja.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 masih belum sempurna, sehingga saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan yang akan datang sangat diharapkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

M. Sa'duddin, Ak., CA., QIA., CFA., CRMP

Pembina Utama Madya
NIP.19640519 198503 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii-iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Daftar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Sumber Daya Manusia.....	3
E. Aspek Strategis Organisasi.....	7
F. Permasalahan Utama (isu Strategis).....	9
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Strategis.....	11
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A.Laporan Hasil Evaluasi atas Impelmentasi Sistem AKIP Sistem Sebelumnya.....	23
B.Pengukuran capaian kinerja organisasi.....	24
C. Analisa Capaian Kinerja.....	26
D. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV P E N U T U P.....	31



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Pendidikan..	4
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan jabatan.....	5
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.....	6
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarna Kerja.....	10
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan.....	13
Tabel 2.2 Program/kegiatan untuk tujuan/sasaran.....	15
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama.....	19
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja.....	20
Tabel 2.5 Target Belanja.....	21
Tabel 2.5 Alokasi anggaran Per Sasaran Strategis.....	21
Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	23
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	24
Tabel 3.4 Membandingkan antara target dan realisasi.....	26
Tabel 3.5 Membandingkan realisasi kinerja sebelumnya.....	26
Tabel 3.6 Membandingkan realisasi kinerja RPJMD.....	27
Tabel 3.7 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	28
Tabel 3.8 Efisiensi penggunaan program/kegiatan.....	29
Tabel 3.9 Realisasi anggaran.....	29
Tabel 3.9 Realisasi anggaran Perprogram.....	30



Daftar Lampiran

1. Ikhtisar Hasil Sementara Evaluasi Implementasi SAKIP Pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
2. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terbentuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menetapkan kriteria besaran Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sebagai upaya untuk menata organisasi Pemerintah yang efisien, efektifitas dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan Perangkat Daerah efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 dan melaksanakan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.



2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Keuangan Dan Pengelolaan Aset Sesuai dengan rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah
- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian dan Pelayanan Umum di Bidang Keuangan Dan Pengelolaan Aset
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang keuangan dan pengelolaan aset.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang anggaran.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perbendaharaan
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Akuntansi
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengelolaan barang milik daerah
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perusahaan daerah
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- j. Pembinaan kelompok Jabatan fungsional
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI





D. SUMBER DAYA MANUSIA.

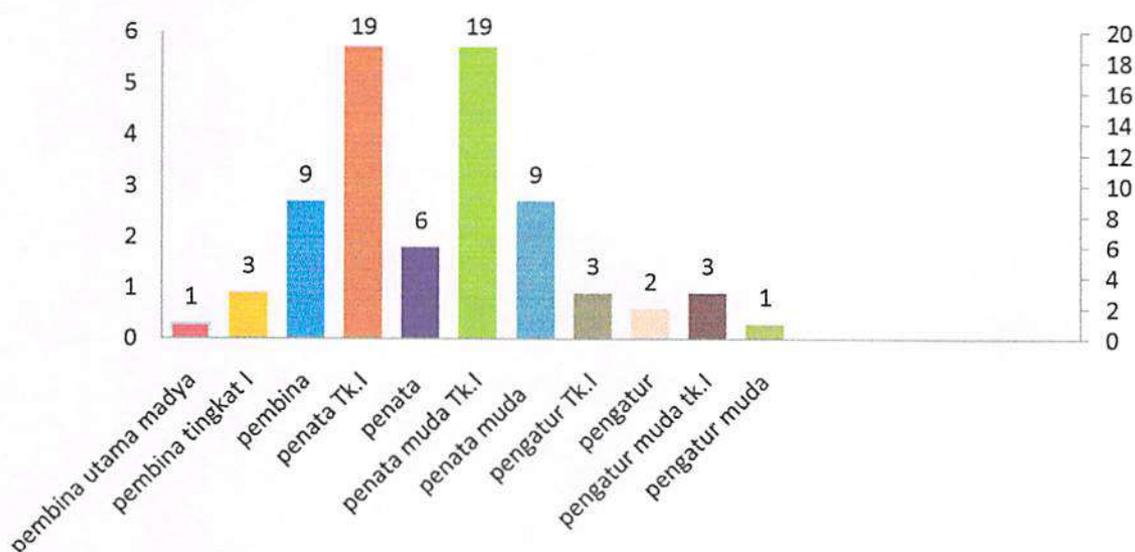
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan sebagai berikut :

Tabel.1.1

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Madya	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
3.	Pembina	IV/ a	9
4.	Penata Tk. I	III/d	19
5.	Penata	III/c	6
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	19
7.	Penata Muda	III/a	9
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	3
9.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
11.	Pengatur Muda	II/a	1
	TOTAL		75



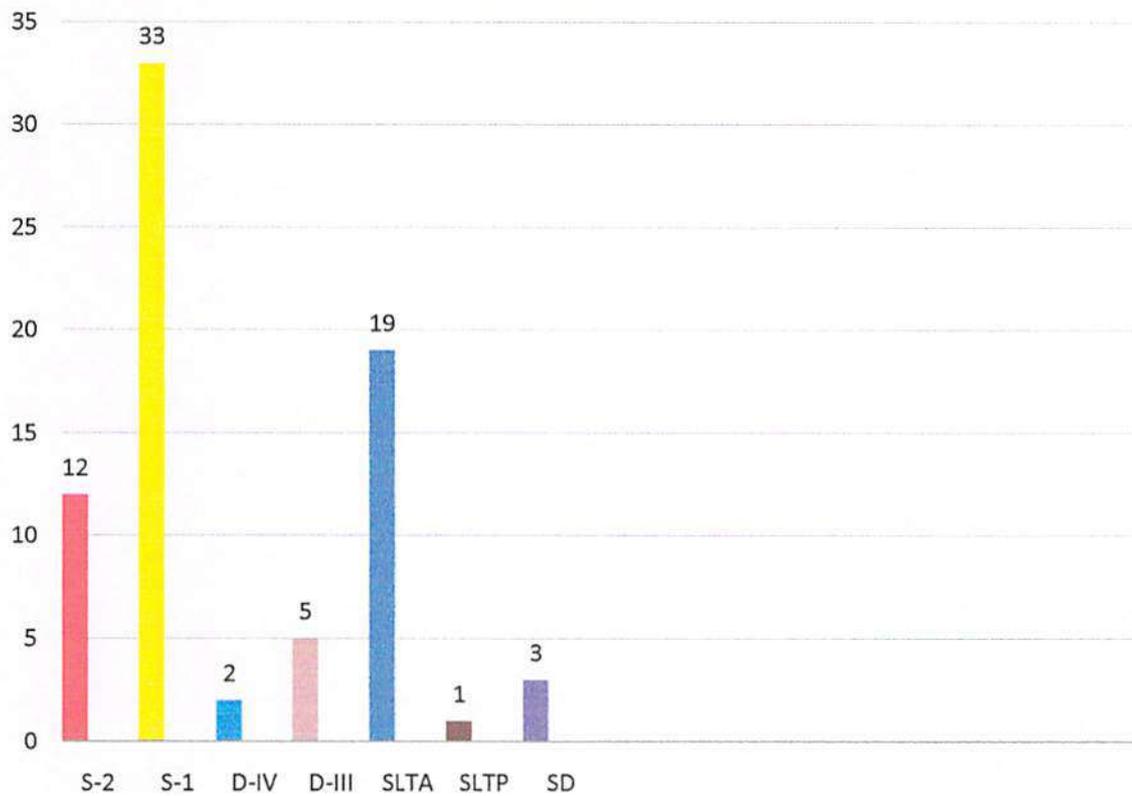
Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2019



2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	12
2.	S-1	33
3.	D-IV	2
4.	D-III	5
5.	SLTA	19
6.	SLTP	1
7.	SD	3
	TOTAL	75



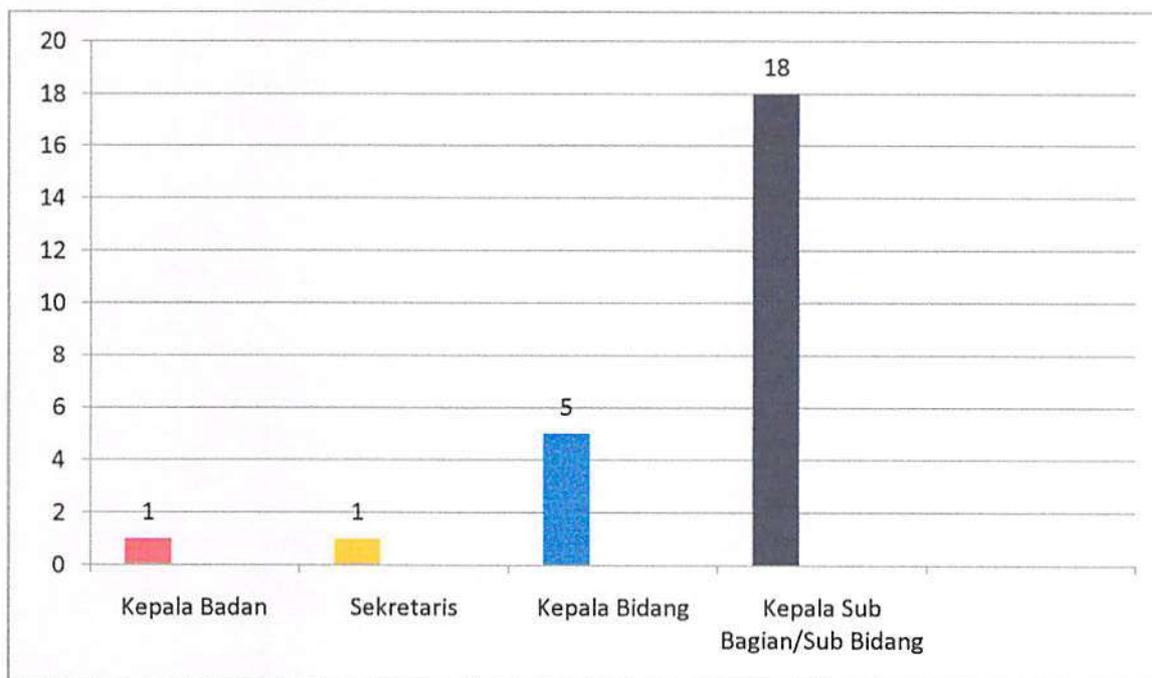
Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2019



3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 1.3

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Badan (JPT)	II	1
2.	Sekretaris (Administrator)	III	1
3.	Kepala Bidang (Administrator)	III	5
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Pengawas)	IV	18
	TOTAL		25



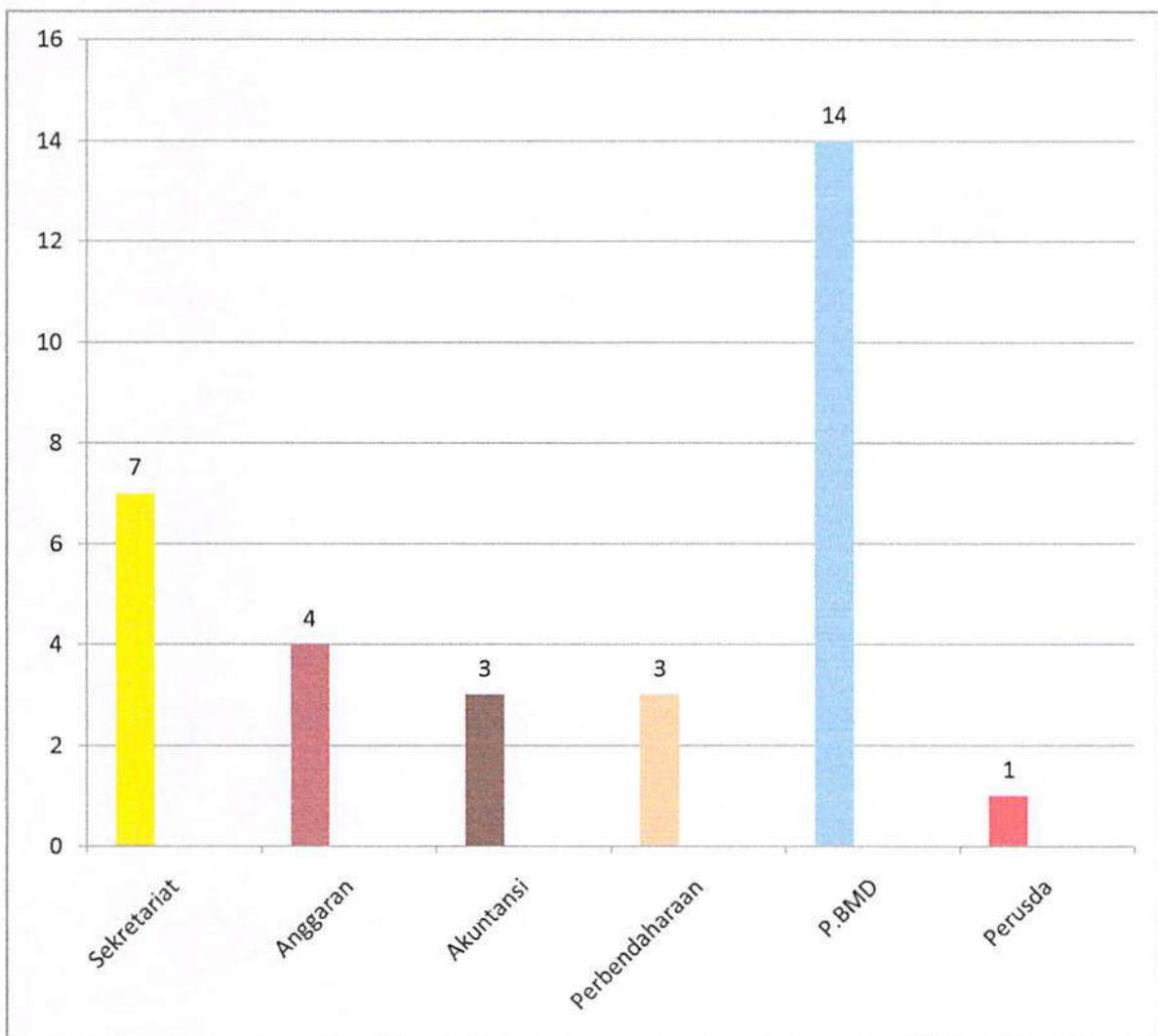
Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2019



4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 1.4

NO.	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	7
2.	Bidang Anggaran	4
3.	Bidang Perbendaharaan	3
4.	Bidang Akuntansi	3
5.	Bidang Pengelolaan BMD	14
6.	Bidang Perusahaan Daerah	1
	TOTAL	32



Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2019



E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

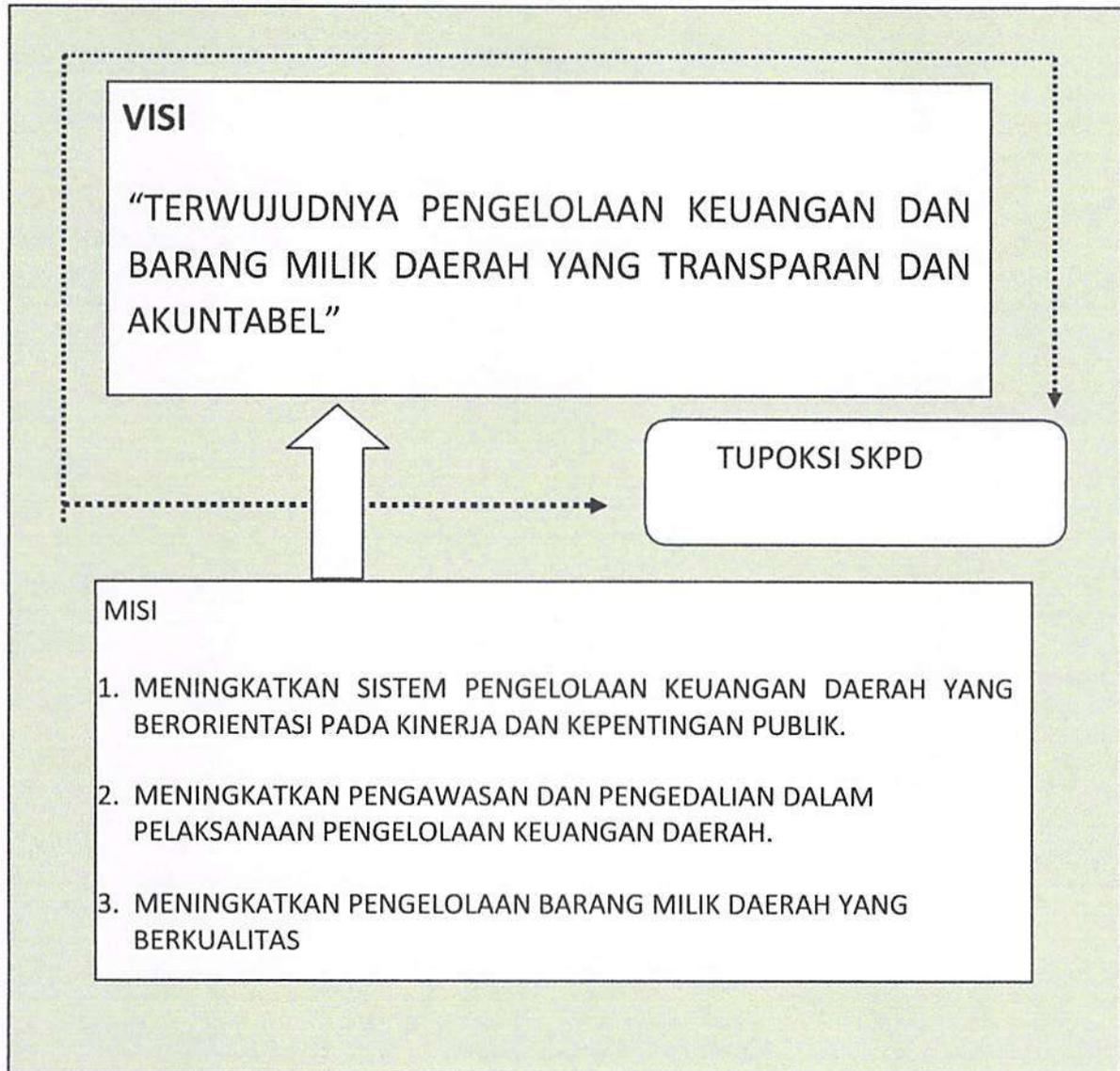
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Visi adalah suatu gambaran untuk menentukan keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh Stakeholder Pembangunan. Untuk itu Visi dan Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel“** dan Visi ini kemudian dijabarkan kedalam Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik.
2. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.



Keterkaitan antara Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat dalam gambar berikut :





F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Adanya revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyesuaian urusan dan kewenangan. Semula terdapat urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sekarang berpindah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat dan sebaliknya.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.
3. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat pada akhir tahun anggaran berjalan sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan keuangan daerah.
4. Realisasi anggaran penyelesaian sertifikasi sangat dipengaruhi pihak eksternal.
5. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bulan Juli 2018, berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian :
 - a. Perubahan struktur pengadaan
 - b. Perubahan tugas wewenang pelaku pengadaan (Pejabat Pengadaan/Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tim Teknis Pengadaan)
 - c. Perubahan dokumen dan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkendala pada ketersediaan barang yang dibutuhkan.



G. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki sarana gedung kantor sendiri dan masih bergabung dengan gedung kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk sarana penunjang kinerja lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.5

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	Tanah	-	M2	
2.	Bangunan yang terdiri : a. Ruang Kerja b. Ruang Rapat c. Ruang Server d. Mushola e. Gudang f. Internet	11 3 2 2 2 2	Unit Unit Unit Unit Unit Jaringan	
3.	Listrik	3	Jaringan	
4.	Air	3	Jaringan	
5.	Telpon	-	Jaringan	
6.	Kendaraan yang terdiri : a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 4	44 36		35=Baik 9 =Kurang baik 31=Baik 5 =Kurang baik ➤ Pengurangan Mutasi ke Balitbangda 1 Unit ➤ Penambahan Kendaraan jabatan Kepala Badan 1 Unit

Keterangan :

Barang Inventaris BPKAD Provinsi Kalimantan Timur lainnya, masih dalam tahap sinkronisasi data antara barang Inventaris Ex. Biro Keuangan dan Ex. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dari visi dan misi tersebut, selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan arah kebijakan terhadap pelaksanaan dan target program/kegiatan yang dilaksanakan :

1. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah.
3. Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel

Adapun Sasaran yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Terwujudnya Tata Kelola BMD Yang Berkualitas.

Terhadap Sasaran diatas ditetapkan Indikator Sasaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

1. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RPAPBD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Ketepatan Waktu Evaluasi RAPBD dan RPAPBD Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur.
3. Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Gubernur Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Timur.



4. Prosentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar.
6. Prosentase laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu Dokumen Perjanjian Kinerja/ Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen yang terkait dengan Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) dan merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan adanya Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP). Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Target Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 akan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran.



1. Guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Sasaran, IKU dan Target Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN S/D TAHUN 2019	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparans Dan Akuntabel	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RP-APBD Prov.Kaltim	Meninggkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Ketepatan Waktu Evaluasi RA-APBD dan RP-APBD Kab/Kota Se-Kaltim		Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Ketepatan Waktu penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD dan pergub Penjabaran pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Prov.Kaltim		Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Prosentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP		Prosentase	Persen	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar		Prosentase	Persen	80%	100%	100%	100%	100%	100%



Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparans Dan Akuntabel	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah yang sesuai SAP dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Tata Kelola BMD Yang Berkualitas	Prosentase	Persen	80%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	------------	--------	-----	------	------	------	------	------



2. Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Tabel.2.2

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparans Dan Akuntabel	Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	Tepat Waktu	Waktu	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (tentang APBD).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD. ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD. ▪ Impementasi SIMDA Keuangan Pada Pemerintah Prov.Kaltim. ▪ Penyusunan Analisa Standar Belanja. ▪ Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ▪ Pengelolaan Pengadministrasian Usulan Dan Penetapan Penjabat Pengelola Keuangan Daerah. ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD.



						<ul style="list-style-type: none">▪ Rekonsiliasi Keuangan Daerah▪ Pengelolaan Belanja Hibah Bantuan Sosial Dan Penyertaan Modal.▪ Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.▪ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah.▪ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan.▪ Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota.▪ Peningkatan Manajemen aset/barang daerah▪ Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD▪ Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD.▪ Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD.▪ Pelaksanaan Administrasi
--	--	--	--	--	--	---



					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran. ▪ Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. ▪ Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Pemerintah Daerah 	<p>Perkantoran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana. ▪ Pemeliharaan perlatan dan kelengkapan sarana dan prasarana. ▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota. ▪ Evaluasi Rancangan Perda KDh Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota. ▪ Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota. ▪ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah KDh Tentang



						<p>Pertanggungjawab an Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi.
2	Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparans Dan Akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola BMD Yang Berkualitas	Prosentase	Prose ntase	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensertifikatan Dan Pengamanan Aset Daerah. ▪ Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan. ▪ Penghapusan Penilaian Dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah



3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023

Tabel.2.3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RPAPBD Provinsi Kalimantan Timur	Tepat waktu atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.	Bukti Penyampaian	Kabid Anggaran
		Ketepatan waktu evaluasi RA-APBD dan RPAPBD dan RPAPBD Kab/Kota Se-kaltim	Tepat waktu atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.	Bukti Penyampaian	Kabid Anggaran
		Ketepatan waktu penyusunan Perda pertanggungjawaban APBD dan Pergub penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Prov.Kaltim	Tepat waktu atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.	Bukti Penyampaian	Kabid Akuntansi
		Prosentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah laporan keuangan SKPD tepat waktu dengan SAP $\times 100\%$ Jumlah laporan keuangan SKPD dilingkungan Pemprov.Kaltim	Laporan keuangan SKPD Provinsi Kaltim	Kabid Akuntansi
		Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar.	Jumlah SP2D yang tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah SP2D	Rekapitulasi SP2D	Kabid Perbendaharaan
2.	Terwujudnya Tata Kelola BMD Yang Berkualitas	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah yang sesuai SAP dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PD yg Lap.BMD sesuai dengan SAP dan Peraturan $\times 100\%$ Jumlah PD Prov.Kaltim	Jumlah Lap.BMD Perangkat Daerah	Kabid Pengelolaan BMD



C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel.2.4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RPAPBD Provinsi Kalimantan Timur	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Bidang Anggaran
		Ketepatan waktu evaluasi RA-APBD dan RPAPBD dan RPAPBD Kab/Kota Se-kaltim	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Bidang Anggaran
		Ketepatan waktu penyusunan Perda pertanggungjawaban APBD dan Pergub penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Prov.Kaltim	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Bidang Akuntansi
		Prosentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Prosentase	100%	Bidang Akuntansi
		Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar.	Prosentase	100%	Bidang Perbendaharaan
2.	Terwujudnya Tata Kelola BMD Yang Berkualitas	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah yang sesuai SAP dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase	100%	Bidang P.BMD



1. Rencana Anggaran Tahun 2019.

Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp45.389.920.000,-, dan penambahan anggaran perubahan APBD 2019 menjadi Rp52.719.598.501,-, dengan rincian sbb :

- Belanja tidak langsung Rp. 12.647.998.000,-
- Belanja Langsung Rp. 52.719.598.501,-
- Realisasi anggaran BL Rp. 40.459.946.671,66 (76,75%).
- Realisasi BL Rp. 10.647.998.000,- (86,79%).

2. Target belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Tabel 2.5

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019		
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
1.	Belanja Tidak Langsung	12.647.998.000,-	10.647.998.000,-	86,79
2.	Belanja Langsung	52.719.598.501,-	40.459.946.671,66	76,75
	JUMLAH	65.367.596.501,-	51.107.944.671,66	

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Ketepatan Waktu Penyusunan anggaran APBD	35.826.098.501,-	67,95	APBD
2.	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah Yang Berkualitas	16.893.500.000,-	32,04	APBD
	JUMLAH	52.719.598.501,-		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah Proses Sistematis Dan Berkesinambungan untuk Menilai Keberhasilan Dan Kegagalan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Program, Kebijakan, Sasaran Dan Tujuan Yang Telah Ditetapkan Dalam Mewujudkan Visi, Misi Dan Strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019 serta mendasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya pada Sub Bab ini Disajikan :

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Terlampir Ikhtisar Hasil Sementara Evaluasi Implementasi SAKIP Pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur).

Tabel 3.1

NO.	SASARAN STRATEGIS	BOBOT	NILAI 2018	2019
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Program	30%		0
2.	Pengukuran Kinerja	25%		0
3.	Pelaporan Kinerja	15%		0
4.	Evaluasi Kinerja	10%		0
5.	Capaian Kinerja	20%		0
	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja	100%	> 50 %. s.d 60% (CC)	0

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP. (terlampir Ikhtisar Hasil Sementara Evaluasi Implementasi SAKIP Pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur).

Tabel 3.2

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1.	Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kerja, Tim merekomendasikan BPKAD Provinsi Kaltim agar dapat melakukan perbaikan atas data-data diatas	Melakukan perbaikan atas arahan Tim Inspektorat Prov.Kaltim	Hasil Evaluasi atas Rencana Aksi dapat menunjukkan perbaikan untuk setiap periode



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019

Tabel 3.3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Ketepatan Waktu Penyusunan Anggaran APBD	Ketepatan waktu	Waktu	Tepat Waktu	Program pelayanan administrasi perkantoran		100%						
						Tw I		2.311.142.000	30,60%				
						Tw II		1.932.974.499	25,59%				
						Tw III		1.606.294.001	21,27%				
										Tw IV		1.700.487.000	22,52%
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%						
						Tw I		1.464.062.900	39,95%				
						Tw II		262.273.100	7,15%				
						Tw III		30.000.000	0,81%				
										Tw IV		1.906.951.251	52,04%
					Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah		100%						
						Tw I		147.900.000	96,38%				
Tw II		5.550.000	3,61%										
Tw III		0	0%										
					Tw IV		0	0%					
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100%											
	Tw. I		9.481.590.550	42,87%									
	Tw II		4.867.127.700	22,01%									
	Tw III		2.691.750.000	12,17%									
					Tw IV		5.071.399.000	22,93%					
Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan daerah		100%											
Tw I		1.305.687.500											



									55,66%
						Tw II		537.900.000	22,93%
						Tw III		502.000.000	21,40%
						Tw IV		0	0%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah Yang Berkualitas	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah yang sesuai SAP dan Peraturan Perundang-undangan		Prosentase	Program peningkatan sarana dan prasarana daerah		100%		
						Tw I		3.177.300.000	18,80%
						Tw II		11.599.600.000	68,66%
						Tw III		1.297.900.000	7,68%
						Tw IV		818.700.000	4,84%



C. Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 :

Tabel 3.4

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Ketepatan Waktu	Tepat Waktu	35.826098.501,-	26.363.322.048.01	74,53
2.	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah yang sesuai SAP dan Peraturan Perundang- undangan	Persen	16.893.500.000,-	14.096.624.623,65	83,44
	Jumlah		52.719.598.501,-	40.459.946.671,66	76,75

2. Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Turun / naik
			2018	2019	
1.	Ketepatan waktu	Tepat Waktu	18.199.901.553	26.363.220.048,01	naik
					naik
2.	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah yang sesuai SAP dan Peraturan Perundang- undangan	Dok	5.512.323.334	14.096.624.623,65	naik



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6

No	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1.	Ketepatan Waktu	waktu	27.662.120.000,-	24.956.032.081,01	
2.	Prosentase Laporan BMD Perangkat Daerah yang sesuai SAP dan Peraturan Perundang-undangan	Dok	16.074.800.000,-	14.096.624.623,65	



4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan penganggaran.
- b. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya perbedaan persepsi regulasi dalam proses Pensertifikatan aset tetap/tanah.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas antara lain :

- a. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja.
- b. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
- c. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder (horizontal maupun instansi vertikal).

Langkah antisipatif untuk menaggulangi kendala yang mungkin terjadi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pembaharuan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.
- d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait/stakeholder.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi (4-5)
1	2	3	4	5
1.	Ketepatan Waktu penyusunan anggaran APBD	74,53	63,50	11,03
2.	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah Yang Berkualitas	83,44	32,04	51,4



Tabel efisiensi penggunaan anggaran program/kegiatan

Tabel 3.8

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai efisiensi	%	Total APBD		Jumlah Program yang dialokasikan		Total Program/kegiatan		Ket
					Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	36.308.208.000,-	30.940.386.737,-	0,85	85,21	14.089.408.000,-	21.514.400.000,-	6	32	6	32	-
2018	45.825.934.193,-	36.924.345.478,79	0,80	80,57	31.274.912.194,-	13.675.022.000,-	6	31	6	31	-
2019	65.367,596.501,-	51.438.018.470,66	0,76	76,74	52.719.598.501,-	12.647.998.000,-	6	34	6	34	-

E. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.9

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% capaian	target	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketepatan Waktu penyusunan anggaran APBD	100%	74,53	74,53	35.826.098.501,-	26.363.322.048,01	74,53
2.	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah Yang Berkualitas	100%	83,44	83,44	16.893.500.000,-	14.096.624.623,65	83,44
	TOTAL				52.719.598.501	40.459.946.671,66	



2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan :

Tabel 3.10

No.	Program/Kegiatan	anggaran			Ket
		Target	Realisasi	% capaian	
1.	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.550.897.500,-	6.667.918.967,-	88,31	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.664.287.251,-	3.216.691.429,-	87,78	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	153.450.000,-	97.444.500,-	63,50	
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	22.111.876.250,-	14.973.975.185,01	67,72	
4	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	2.345.587.500,-	1.407.289.967,-	60,00	
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	16.893.500.000,-	14.096.624.623,-	83,44	
	Jumlah	52.719598.501,-	40.459.946.671,66	76,75	



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.

Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun mendatang.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah ke depan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Sa'duddin', written over a faint, stylized outline of a triangle.

M. Sa'duddin, Ak.,CA.,QIA.,CFrA.,CRMP
Pembina Utama Madya
NIP.19640519 198503 1 001